

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM BENTUK KERTAS HARUS MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI BERIKUT:

1. **WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI;**
2. **SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISAMPAIKAN BERSTATUS NIHIL ATAU KURANG BAYAR;**
3. **TIDAK DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA DALAM BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK;**
4. **BELUM PERNAH MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN DALAM DOKUMEN ELEKTRONIK;**
5. **TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA;**
6. **TIDAK MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN PAJAK DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN;**
7. **LAPORAN KEUANGANNYA TIDAK DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK; DAN**
8. **SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISAMPAIKAN BUKAN UNTUK BAGIAN TAHUN PAJAK.**

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Bentuk formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. **Formulir ini digunakan untuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 dan seterusnya;**
2. Wajib Pajak orang pribadi mengunduh dokumen SPT Tahunan PPh dalam bentuk kertas melalui laman www.pajak.go.id atau mengambil secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan menyampainya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir;
3. Agar formulir dapat dibaca dengan jelas oleh mesin pemindai (*scanner*), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Formulir dicetak menggunakan kertas F4/Folio (8,5 x 13 inci atau 21,59 x 33,02 cm) dengan berat minimal 70 gram;
 - b. Kertas tidak boleh terlipat, kusut, sobek, atau kotor.
4. Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya serta disusun dalam bahasa Indonesia;
5. **Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dimulai dari induk.** Terdapat lampiran SPT Tahunan PPh yang bersifat wajib diisi oleh semua Wajib Pajak orang pribadi serta lampiran yang wajib diisi dan disampaikan hanya dalam kondisi tertentu.

- a. Lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang wajib diisi oleh semua Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 - 1) Lampiran 1 Bagian A (Harta pada Akhir Tahun Pajak); dan
 - 2) Lampiran 1 Bagian C (Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan). Dalam hal tidak terdapat tanggungan, bagian ini diisi dengan tanda hubung (-).
 - b. Lampiran yang wajib disampaikan dalam kondisi tertentu yaitu lampiran yang wajib diisi dan dilampirkan tergantung pada pilihan jawaban Wajib Pajak atas pertanyaan pada induk SPT Tahunan PPh.
6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dapat dilunasi dengan cara penggunaan deposit pajak melalui penyetoran pajak dengan menggunakan surat setoran pajak, pemindahbukuan, atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke akun deposit pajak, sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan, sesuai dengan jumlah kurang bayar. Bukti pembayaran wajib dilampirkan sebagai lampiran tambahan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;
7. Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam bentuk kertas dapat dilakukan:
 - a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan atau tempat lain meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (Drop Box); atau
 - b. melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 8. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani, tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen, atau kondisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP.



TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE		STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
	BULAN MULAI	BULAN AKHIR			
<input type="checkbox"/> TAHUN PAJAK <input type="checkbox"/> BAGIAN TAHUN PAJAK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> PEMBETULAN	<input type="checkbox"/> PEKERJAAN <input type="checkbox"/> KEGIATAN USAHA <input type="checkbox"/> PEKERJAAN BEBAS	<input type="checkbox"/> PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL <input type="checkbox"/> PEMBUKUAN STELSEL KAS <input type="checkbox"/> PENCATATAN
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S.D.	<input type="checkbox"/>	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP
2. NAMA
3. JENIS ID KTP KITAS PASPOR
4. NO. ID
5. NO.TELEPON
6. EMAIL

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI

PISAH HARTA (PH)

MEMILIH TERPISAH (MT)

(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH atau MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1 a) APakah ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?

- Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
 Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1 b) APakah ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?

- Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
 Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2) APakah ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?

- Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
 Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
 Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3) APakah ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?

- Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
 Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
 Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
(Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)

4) ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. SUBTUKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN.

- Dagang. (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
 Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
 Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

c) APakah ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?

- Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
 Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

d) APakah ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?

- Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
 Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG

2) PENGHASILAN NETO SETAHUN

(1a + 1b + 1c + 1d)

3) APakah TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?

- Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

- Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

4) PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO

(2 - 3)

5) PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

(4 - 5)

6) PENGHASILAN KENA PAJAK

(4 - 5)

7) PPh TERUTANG

8) APakah TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?

- Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

- Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

9) PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG

(7 - 8)

D. KREDIT PAJAK

10 a) APakah TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHKAI LAIN?

- Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
 Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

b) ANGSURAN PPh PASAL 25

c) STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

d) APakah ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?

- Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

- Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)



E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

- 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d)
b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?
Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b)

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

- 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN (GANTI SPT SEBELUMNYA)
b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a)

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh LEBIH BAYAR PADA 11a ATAU 12b MOHON:
 Dikembalikan melalui pemeriksaan.
 Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan.

NOMOR REKENING

NAMA BANK

NAMA PEMILIK REKENING

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

- 13 a APAKAH ANDA HANYA MENERIMA PENGHASILAN TERATUR DAN BERKEWAJIBAN MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?
Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
Ya, angsuran PPh Pasal 25-nya adalah (1/ x (9 - 10a)
b APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?
Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
Ya. (Isi Lampiran 4 Bagian A)
c APAKAH ANDA MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 OPPT TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?
Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25.
Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

- 14 a HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK (Isi Lampiran 1 Bagian A)
b APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?
Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
c APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?
Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
d APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?
Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
e APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL?
Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
Ya. (Isi Lampiran 3C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
f APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA ENTERTAINMENT, BIAYA PROMOSI, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, SERTA PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH?
Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
Ya. (Isi Lampiran 3D, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
g APAKAH ANDA MENERIMA DIVIDEN DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DARI LUAR NEGERI DAN MELAPORKANNYA SEBAGAI PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?
Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
Ya. (Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah)
h KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERENTU YANG DAPAT DIMINTAKAN PENGEMBALIAN.
(Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

- a LAPORAN KEUANGAN/LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT
b BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB
c BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
d SURAT KUASA KHUSUS
e DOKUMEN LAINNYA
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> TIDAK | <input type="checkbox"/> YA |
| <input type="checkbox"/> TIDAK | <input type="checkbox"/> YA |
| <input type="checkbox"/> TIDAK | <input type="checkbox"/> YA |
| <input type="checkbox"/> TIDAK | <input type="checkbox"/> YA |
| <input type="checkbox"/> TIDAK | <input type="checkbox"/> YA |

K. PERNYATAAN

- DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PENANDA TANGAN WAJIB PAJAK WAKIL/KUASA

NIK/NPWP

NAMA LENGKAP

TANGGAL
BULAN
TAHUN
TANDA TANGAN

PERHATIAN

LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK UNTUK MELAPORKAN HARTA, UTANG, DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGJAN, PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN, DANATUA BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPn

- A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
 - B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
 - C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGJAN
 - D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
 - E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

LAMPIRAN 1
HALAMAN 1

A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

1. KAS DAN SETARA KAS

KODE	DESKRIPSI	NOMOR AKUN	ATAS NAMA	NAMA BANK/INSTITUSI	LOKASI HARTA	TAHUN PEROLEHAN	SALDO	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH TABEL 1							1	

JUMLAH TABEL 1

1

2. PIUTANG

KODE	DESKRIPSI	LOKASI PENERIMA PINJAMAN	PENERIMA PINJAMAN	NILAI PIUTANG	TAHUN DIMULAI	SALDO PIUTANG SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				

JUMLAH TABEL 2

2

3. INVESTASI/SEKURITAS

KODE	DESKRIPSI	LOKASI HARTA	BANK/INSTITUSI/PENERIMA INVESTASI	NOMOR AKUN	HARGA PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI SAATINI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			NPWP: NAMA:					
			NPWP: NAMA:					
			NPWP: NAMA:					
			NPWP: NAMA:					
			NPWP: NAMA:					
			NPWP: NAMA:					
JUMLAH TABEL 3				3.6		3.8		

JUMLAH TABEL 3

36

3

4. HARTA BERGERAK

KODE	DESKRIPSI	NOMOR POLISI/REGISTRASI	KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	TIPE: MEREK/MODEL:		<input type="checkbox"/> ATAS NAMA SENDIRI <input type="checkbox"/> ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
	TIPE: MEREK/MODEL:		<input type="checkbox"/> ATAS NAMA SENDIRI <input type="checkbox"/> ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
	TIPE: MEREK/MODEL:		<input type="checkbox"/> ATAS NAMA SENDIRI <input type="checkbox"/> ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
	TIPE: MEREK/MODEL:		<input type="checkbox"/> ATAS NAMA SENDIRI <input type="checkbox"/> ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
	TIPE: MEREK/MODEL:		<input type="checkbox"/> ATAS NAMA SENDIRI <input type="checkbox"/> ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				

JUMLAH TABEL 4

4

PERHATIAN

LAMPIRAN INI DISI OLEH WAJIB PAJAK
UNTUK MELAPORKAN HARTA, UTANG,
DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG
MENJADI TANGGUNGJAN, PENGHASILAN
NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN,
DAN/ATAU BUKTI PEMOTONGAN/
PEMUNGUTAN PPh

- A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
 - B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
 - C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGJAN
 - D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
 - E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

LAMPIRAN 1
HALAMAN 2

NIK/NPWP

TAHUN PAJAK

A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

5. HARTA TIDAK BERGERAK

KODE	DESKRIPSI	LOKASI HARTA	UKURAN PROPERTI	SUMBER KEPEMILIKAN	NOMOR SERTIFIKAT	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAATINI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		TANAH: BANGUNAN:							
		TANAH: BANGUNAN:							
		TANAH: BANGUNAN:							
		TANAH: BANGUNAN:							
		TANAH: BANGUNAN:							
		TANAH: BANGUNAN:							
		TANAH: BANGUNAN:							
JUMLAH TABEL 5							5		

6. HARTA LAINNYA

7. IKHTISAR HARTA

DESKRIPSI (1)	HARGA PEROLEHAN (2)	NILAI SAAT INI (3)
JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK 7		

JUMLAHKAN HARTA PADA TABEL 1 SAMPAI DENGAN TABEL 6 DI TABEL 7 KOLOM (2)

PINDAHKAN JUMLAH HARTA TABEL 7 KOLOM (2) KE INDUK BAGIAN I ANGKA 14 HURUF a.

B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

PINDAHKAN JUMLAH TABEL B KE INDUK BAGIAN I ANGKA 14 HURUF b.

PERHATIAN

LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK
UNTUK MELAPORKAN HARTA, UTANG,
DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG
MENJADI TANGGUNGJAN, PENGHASILAN
NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN,
DAN/ATAU BUKTI PEMOTONGAN/
PEMUNGUTAN PPn

- A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
 - B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
 - C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
 - D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
 - E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

NIK/NPWP

LAMPIRAN 1

HALAMAN 3

C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

JUMLAH TABEL D

D

PINDAHKAN JUMLAH TABEL D KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF a.

E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

JUMLAH KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

16

KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI (DIISI DARI LAMPIRAN 2 JUMLAH TABEL C.10)

17

JUMLAH TABEL E (16) + (17)

E

PINDAHKAN JUMLAH TABEL E KE INDUK BAGIAN D ANGKA 10 HURUF a.

PERHATIAN

LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK UNTUK MELAPORKAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL, PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, DAN/ATAU PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

- A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL
 - B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
 - C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

LAMPIRAN 2

NIK/NPWP

TAHUN PAJAK

Page 1 of 1

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

JUMLAH TABEL A

A

PINDAHKAN JUMLAH TABEL A KOLOM (5) KE INDUK BAGIAN I ANGKA 14 HURUF c.

B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

JIMI AH TABEL B

B

PINDAHKAN JIMLAH TABEL B KE INDUK BAGIAN LANGKA 14 HURUF d

C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI		NO	SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN NAMA	TANGGAL TRANSAKSI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)	PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI			KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
	NEGARA						NILAI DALAM MATA UANG ASING	NILAI DALAM RUPIAH	MATA UANG ASING	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
JUMLAH TABEL C				C.6			C.8			C.10

JUMLAH TABEL C

C6

C

C10

PINDAHKAN JUMLAH TABEL C KOLOM (6) KE INDUK RACIAN B ANGKA 1 HURUF d

PINDAHKAN JUMLAH TABEL C KOLOM (10) KE LAMPIRAN 1 RACIAN E PARIS 17 KOLOM (6)

PFRHATIAN

LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN STELSEL
KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL DI
SEKTOR USAHA DAGANG

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (DAGANG)

LAMPIRAN 3A-1

NIK/NPWP

TAHUN PAJAK

A.1 LAPORAN LABA RUGI

PINDAHKAN LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK KOLOM (10) KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF b

A.2 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

KODE AKUN	AKUN
(1)	(2)
	ASET LANCAR
1101	KAS DAN SETARA KAS
1200	INVESTASI
1122	PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
1123	PIUTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
1124	PIUTANG LAINNYA - PIHAK KETIGA
1125	PIUTANG LAINNYA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
1131	DIKURANGI: CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1401	PERSEDIAAN
1421	BEBAN DIBAYAR DI MUKA
1422	UANG MUKA
1423	PAJAK DIBAYAR DI MUKA
1499	ASET LANCAR LAINNYA
	ASET TIDAK LANCAR
1501	PIUTANG JANGKA PANJANG
1523	TANAH DAN BANGUNAN
1524	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN
1529	ASET TETAP LAINNYA
1530	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN
1541	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI
1599	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA
1600	ASET TAK BERWUJUD - NET
1611	ASET PAJAK TANGGUHAN
1698	ASET TIDAK LANCAR LAINNYA
1700	JUMLAH ASET

KODE AKUN	AKUN
(1)	(2)
	LIABILITAS JANGKA PENDEK
2102	UTANG USAHA - PIHAK KETIGA
2103	UTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
2111	UTANG BUNGA
2191	UTANG PAJAK
2192	UTANG DIVIDEN
2195	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
2201	UTANG BANK JANGKA PENDEK
2202	UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN
2203	UANG MUKA
2228	LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
	LIABILITAS JANGKA PANJANG
2301	UTANG BANK JANGKA PANJANG
2303	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA
2304	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
2321	LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN
2998	LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA
2999	JUMLAH LIABILITAS
	EKUITAS
3102	MODAL SAHAM
3120	TAMBAHAN MODAL DISETOR
3200	SALDO LABA
3298	EKUITAS LAINNYA
3299	JUMLAH EKUITAS
3300	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT TIDAK DIAUDIT

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

PERHATIAN

LAMPIRAN INI HANYA DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL DI SEKTOR USAHA JASA

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (JASA)

LAMPIRAN 3A-2

TAHUN PAJAK

A.1.LAPORAN LABA RUGI

PINDAHKAN LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK KOLOM (10) KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF b

A.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

KODE AKUN	AKUN		KODE AKUN	AKUN	
(1)	(2)		(1)	(2)	
ASSET LANCAR		LIABILITAS JANGKA PENDEK			
1101	KAS DAN SETARA KAS	2102	UTANG USAHA - PIHAK KETIGA		
1200	INVESTASI	2103	UTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		
1122	PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA	2111	UTANG BUNGA		
1123	PIUTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	2191	UTANG PAJAK		
1124	PIUTANG LAINNYA - PIHAK KETIGA	2192	UTANG DIVIDEN		
1125	PIUTANG LAINNYA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	2195	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR		
1131	DIKURANGI: CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH	2201	UTANG BANK JANGKA PENDEK		
1401	PERSEDIAAN	2202	UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN		
1421	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	2203	UANG MUKA		
1422	UANG MUKA	2228	LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA		
1423	PAJAK DIBAYAR DI MUKA	LIABILITAS JANGKA PANJANG			
1499	ASSET LANCAR LAINNYA	2301	UTANG BANK JANGKA PANJANG		
ASSET TIDAK LANCAR		2303	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA		
1501	PIUTANG JANGKA PANJANG	2304	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		
1523	TANAH DAN BANGUNAN	2321	LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN		
1524	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	2998	LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA		
1529	ASET TETAP LAINNYA	2999	JUMLAH LIABILITAS		
1530	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	EKUITAS			
1541	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	3102	MODAL SAHAM		
1599	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	3120	TAMBAHAN MODAL DISETOR		
1600	ASET TAK BERWUJUD - NET	3200	SALDO LABA		
1611	ASET PAJAK TANGGUHAN	3298	EKUITAS LAINNYA		
1698	ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	3299	JUMLAH EKUITAS		
1700	JUMLAH ASSET	3300	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		

LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT TIDAK DIAUDIT

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

PERHATIAN

LAMPIRAN INI HANYA DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL DI SEKTOR USAHA INDUSTRI

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (INDUSTRI)

LAMPIRAN 3A-3

NIK/NPWP

TAHUN PAJAK

A.1. LAPORAN LABA RUGI

PINDAHKAN LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK KOLOM (10) KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF b

A.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

KODE AKUN (1)	AKUN (2)
ASET LANCAR	
1101	KAS DAN SETARA KAS
1200	INVESTASI
1122	PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
1123	PIUTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
1124	PIUTANG LAINNYA - PIHAK KETIGA
1125	PIUTANG LAINNYA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
1131	DIKURANGI: CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1402	PERSEDIAAN BAHAN BAKU
1403	PERSEDIAAN BARANG DALAM PROSES
1404	PERSEDIAAN BARANG JADI
1421	BEBAN DIBAYAR DI MUKA
1422	UANG MUKA
1423	PAJAK DIBAYAR DI MUKA
1499	ASET LANCAR LAINNYA
ASET TIDAK LANCAR	
1501	PIUTANG JANGKA PANJANG
1523	TANAH DAN BANGUNAN
1524	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN
1525	PERALATAN
1526	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN
1527	MESIN
1528	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN
1529	ASET TETAP LAINNYA
1530	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN
1541	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASSOSIASI
1599	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA
1600	ASET TIDAK BERWUJUD - NET
1611	ASET PAJAK TANGGUHAN
1698	ASET TIDAK LANCAR LAINNYA
1700	JUMLAH ASET

KODE AKUN	AKUN
(1)	(2)
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
2102	UTANG USAHA - PIHAK KETIGA
2103	UTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
2111	UTANG BUNGA
2191	UTANG PAJAK
2192	UTANG DIVIDEN
2195	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
2201	UTANG BANK JANGKA PENDEK
2202	UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN
2203	UANG MUKA
2228	LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
2301	UTANG BANK JANGKA PANJANG
2303	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA
2304	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
2321	LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN
2998	LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA
2999	JUMLAH LIABILITAS
EKUITAS	
3102	MODAL SAHAM
3120	TAMBAHAN MODAL DISETOR
3200	SALDO LABA
3298	EKUITAS LAINNYA
3299	JUMLAH EKUITAS
3300	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

LAPORAN KEUANGAN

1

DIAUDIT

TIDAK DIAUDIT

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

PERHATIAN

LAMPIRAN INI HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG
MENYELENGGARAKAN PENCATATAN DAN/ATAU
MEMILIKI PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI
LAINNYA

- A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN
- B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

LAMPIRAN 3A-4

NIK/NPWP

TAHUN PAJAK

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

JUMLAH TABEL A

A.4

A.6

PINDAHKAN JUMLAH TABEL A.6 KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF b

B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

JUMLAH TABEL B

B

PINDAHKAN JUMLAH TABEL B KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF c

PERHATIAN

LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG BERKEWAJIBAN
MELAPORKAN RINCIAN REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

LAMPIRAN 3B

NIK/NPWP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TAHUN PAJAK

Page 1

DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)

NO	ID TKU	NAMA TKU	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

PINDAHKAN HURUF f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI KOLOM (15) KE LAMPIRAN 2 BAGIAN A DENGAN KODE 28-423-99 JENIS PENGHASILAN "PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 (DISETOR SENDIRI)

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)

METODE PEMBUKUAN

1. PENCATATAN

2. PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL

JIKA METODE PEMBUKUAN ADALAH 1. PENCATATAN, PINDAHKAN SELURUH DATA PADA MASING-MASING TKU DARI KOLOM (1) SAMPAI KOLOM (16) PADA TABEL B KE TABEL C LAMPIRAN INI. BARIS JUMLAH PPh PADA KOLOM (4) SAMPAI KOLOM (16) DIGABUNGKAN DENGAN JUMLAH PPh PADA TABEL C BARIS JUMLAH PPh SESUAI DENGAN KOLOM
MASING-MASIN

JIKA METODE PEMBUKUAN ADALAH 2. PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL, PINDAHKAN JUMLAH PEREDARAN BRUTO KOLOM (16) KE LAMPIRAN 3A-1/3A-2/3A-3 BAGIAN A.1. DAN JUMLAH PPH KOLOM (16) KE INDUK BAGIAN D ANGKA 10 HURUF

C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)

PINDAHKAN NAMA TKU KOLOM (2), JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS KOLOM (3), DAN JUMLAH PEREDARAN BRUTO KOLOM (16) KE LAMPIRAN 3A-4 BAGIAN A DAN JUMLAH PPH KOLOM (16) KE INDUK BAGIAN D ANGKA 10 HURUF

PERHATIAN

LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG
MEMBEANKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU
AMORTISASI

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**LAMPIRAN 3C**

NIK/NPWP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TAHUN PAJAK

--	--	--	--	--

KODE HARTA	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL PADA TAHUNINI (RUPIAH)	KETERANGAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	HARTA BERWUJUD							
	A. KELOMPOK 1							
	1.							
	2.							
	3.							
	B. KELOMPOK 2							
	1.							
	2.							
	3.							
	C. KELOMPOK 3							
	1.							
	2.							
	3.							
	D. KELOMPOK 4							
	1.							
	2.							
	3.							
	E. KELOMPOK LAINNYA							
	1.							
	2.							
	3.							
II.	BANGUNAN							
	A. PERMANEN							
	1.							
	2.							
	3.							
	B. TIDAK PERMANEN							
	1.							
	2.							
A.	JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL							
B.	JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL							
C.	SELISIH PENYUSUTAN (A-B)							
III.	HARTA TIDAK BERWUJUD							
	A. KELOMPOK 1							
	1.							
	B. KELOMPOK 2							
	1.							
	C. KELOMPOK 3							
	1.							
	D. KELOMPOK 4							
	1.							
	E. KELOMPOK LAINNYA							
	1.							
D.	JUMLAH AMORTISASI FISKAL							
E.	JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL							
F.	SELISIH AMORTISASI (D-E)							

PERHATIAN

LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG BERKEWAJIBAN MEMBAYAR ANGSURAN PPH PASAL 25 DAN/ATAU WAJIB PAJAK YANG STATUS KEWAJIBAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN PASANGANNYA ALAHAR PISAH HARTA (PH) ATAU MEMILIH TERPISAH (MT)

- A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
 - B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

LAMPIRAN 4

TAHUN PAJAK

A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1 | PENGHASILAN NETO | |
| 2 | KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN PAJAK BERIKUTNYA | |
| 3 | ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB | |
| 4 | JUMLAH PENGHASILAN NETO | (1 - 2 - 3) |
| 5 | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK | <input type="text"/> |
| 6 | PENGHASILAN KENA PAJAK | (4 - 5) |
| 7 | PPh TERUTANG | |
| 8 | PENGURANG PPh TERUTANG | |
| 9 | KREDIT PAJAK | |
| 10 | PPh YANG HARUS DIBAYAR | (7 - 8 - 9) |
| 11 | ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA | (1/12 x 10) |

PINDAHKAN JUMLAH ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA PADA NOMOR 11 KE INDUK BAGIAN H ANGKA 13 HURUF b

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

- 1** PENGHASILAN BRUTO
 - 2** PENGHASILAN NETO
 - 3** PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN
 - 4** PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN GABUNGAN
 - 5** PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK GABUNGAN
 - 6** PENGHASILAN KENA PAJAK GABUNGAN (**4** - **5**)
 - 7** PPh TERUTANG GABUNGAN
 - 8** PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH WAJIB PAJAK [(**3a** : **4**) x **7**]
 - 9** PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH SUAMI/ISTRI [(**3b** : **4**) x **7**]

PINDAHKAN JUMLAH PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH WAJIB PAJAK PADA NOMOR 8 KE INDUK BAGIAN C ANGKA 7 SPT WAJIB PAJAK
PINDAHKAN JUMLAH PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH SUAMI/ISTRI PADA NOMOR 9 KE INDUK BAGIAN C ANGKA 7 SPT SUAMI/ISTRI

WAJIB PAJAK

NAMA DAN TTD

SUAMI/ISTR

NAMA DAN TTD

PERHATIAN

LAMPIRAN INI DISI OLEH WAJIB PAJAK YANG MENGAKUI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL, PENGURANG PENGHASILAN NETO, DAN/ATAU PENGURANG PPh TERUTANG

- A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL**
B. PENGURANG PENGHASILAN NETO
C. PENGURANG PPh TERUTANG

LAMPIRAN 5NIK/NPWP TAHUN PAJAK **A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL**

NO	LABA/RUGI NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
			TAHUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	TAHUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	TAHUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	TAHUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	TAHUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	TAHUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	TAHUN PAJAK	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH (TAHUN PAJAK INI)	RUPIAH (TAHUN PAJAK BERJALAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								
JUMLAH TABEL A A								

PINDAHKAN JUMLAH TABEL A KOLOM (8) KE LAMPIRAN INI BAGIAN B BARIS 6 KOLOM (4)

B. PENGURANG PENGHASILAN NETO

NO	KODE	JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5		JUMLAH TABEL B B.5	
6		JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL B.6	
7		JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.5+B.6) B.7	

PINDAHKAN JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.7) DI BARIS 7 KOLOM (4) KE INDUK BAGIAN C ANGKA 3

C. PENGURANG PPh TERUTANG

NO	KODE	JENIS PENGURANG PPh TERUTANG	JUMLAH PENGURANG PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
JUMLAH TABEL C C			

PINDAHKAN JUMLAH TABEL C KE INDUK BAGIAN C ANGKA 8